

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	6	24-6-2002

Keppres pasir laut belum optimal

PEKANBARU (Bisnis): Keppres No.33/2002 tentang Pengaturan pengelolaan pasir laut dinilai belum diterapkan secara optimal karena masih banyak perusahaan eksportir pasir di Riau menunggak iuran.

Jalinus, kasubdis Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Riau mengatakan tidak konsistennya pelaksanaan aturan Kepmenperindag No.441/2002, dapat memberikan celah bagi penyalahgunaan izin yang telah dikeluarkan.

"Padahal sudah jelas diatur bahwa gubernur atau bupati mengeluarkan rekomendasi eksportir pasir laut bila si pengusaha telah melunasi semua pajak dan iuran terhutangnya kepada provinsi atau kabupaten bersangkutan," paparnya kepada *Bisnis* di Pekanbaru akhir pekan lalu.

Tapi, lanjutnya, kenyataan di lapangan justru bertentangan dengan aturan yang ada. Karena banyak perusahaan pasir yang beroperasi di kawasan kabupaten 0-4 mil, katanya, masih menunggak tapi tetap mendapatkan

rekomendasi untuk ekspor pasir ke Singapura.

Ironisnya lagi, menurut Jalinus, keringanan yang diberikan salah satu kabupaten untuk memberikan rekomendasi bagi pengusaha pasir itu karena si pengusaha telah memberikan *bank guarantee* kepada pemda setempat.

"Tapi masih diragukan apakah garansi bank itu sudah senilai dengan total tunggakan dari masing-masing pengusaha atau hanya beberapa persen saja. Tentu ini harus ditindaklanjuti karena menyangkut kesepakatan bersama dalam penerapan suatu peraturan baru," ujar Jalinus.

Dia mengharapkan adanya kesatuan pandangan antara pemda provinsi dan kabupaten dalam penerapan peraturan baru ini demi membenahan mekanisme ekspor yang lebih baik dan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari iuran serta pajak lainnya.

Berdasarkan data instansi itu, total tunggakan para pengusaha pasir di Riau mencapai Rp69,7 miliar. (01)

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	KORAN TEMPO	4	24-06-2002

Tiga Perusahaan Boleh Menambang di Hutan

JAKARTA — Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan Boen M. Purnama mengatakan, ada tiga perusahaan pertambangan di kawasan hutan yang dapat beroperasi.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Barisan Tropical Mining di Sumatra Selatan, PT Jurong Barutama Greston di Kalimantan Selatan, dan PT Galuh Cempaka di Kalimantan Selatan. "Kami tidak mempermasalahkan kegiatan penambangan mereka karena memang bukan di hutan lindung," ujarnya kepada *Koran Tempo* di Jakarta akhir minggu kemarin.

Hingga kini, kata Boen, pihaknya masih melakukan pemetaan kawasan terhadap 137 perusahaan pertambangan yang terhambat oleh undang-undang tentang kehutanan yang melarang pertambangan di hutan lindung. Tapi dari jumlah itu, pihaknya memprioritaskan 22 perusahaan yang menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki kontrak karya.

Dari 137 perusahaan, katanya, 50 sudah menandatangani kontrak karya. "Tapi prioritasnya sekarang hanya 22 perusahaan."

Dia mengungkapkan bahwa Departemen Kehutanan baru meneliti 15 dari 22 perusahaan pertambangan yang telah diterima data koordinatnya berdasarkan peta kawasan hutan. Dari 15 perusahaan itu, tiga perusahaan pertambangan ternyata berada di luar kawasan hutan konservasi. Tepatnya berada di areal penggunaan lain, kawasan suaka

alam, dan kawasan pelestarian alam.

Untuk 13 perusahaan lainnya, seperti PT Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara, menurut Boen berada di kawasan hutan lindung. Bahkan ada perusahaan pertambangan yang arealnya tidak hanya berada di hutan lindung tapi juga di hutan konservasi, seperti PT Freeport Indonesia Company di Papua.

"Bisa saja satu kawasan tambang berada di dua kawasan hutan yang melarang penambangan, sebab areal itu kan tidak mengenal batas wilayah hutan," ujarnya.

Lebih lanjut Boen menyampaikan keheranannya soal kontrak karya pertambangan di hutan konservasi yang lolos. Padahal, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dikeluarkan pada 1990 melarang. Sementara kontrak karya setelah tahun itu.

"Jangankan menambang, mengganggu daun di hutan konservasi saja dilarang keras," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk menyelesaikan kasus penambangan di hutan lindung ini, pemerintah sudah membentuk tim. Tim ini memprioritaskan empat lokasi sebagai sampel kajian, yakni Gag Nickel, Nusa Halmahera Minerals, Weda Bay Nickel, dan Citra Palu Minerals.

Baru mengkaji masalah Gag, katanya, tim terpadu sudah berbeda pendapat cukup kuat. Ada yang minta agar investasinya diperbolehkan. ● taufik kamil

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	6	24-06-2002

Tambang batubara di Cina meledak

BEIJING (Antara): Ledakan gas yang terjadi di sebuah tambang batu bara di Cina Selatan telah menewaskan 111 pekerja tambang.

Menurut laporan televisi setempat—CCTV—sebanyak 24 orang lainnya cedera dan empat orang masih hilang sejak ledakan pada Kamis yang terjadi jauh di dalam tambang milik negara itu di provinsi Heilongjiang.

Tim pemerintah menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di tambang Chengzihe di Jixi, di dekat perbatasan Rusia, 1.300 kilometer di timur laut Beijing.

Sebelumnya, pejabat kantor berita Xinhua

mengatakan sebanyak delapan pekerja tambang yang berada di rumah sakit dalam keadaan luka parah.

Biro keamanan tambang batu bara negara di Cina—yang memiliki industri tambang terbesar di dunia dan paling berbahaya—memerintahkan penghentian produksi pada 10 tambang yang berada di wilayah Jixi.

"Sejumlah tambang lainnya di seluruh Cina harus mengambil pelajaran dari ledakan gas tersebut dan memberikan perhatian lebih bagi keamanan produksi," tulis Xinhua.

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BISNIS INDONESIA	50	24-16-2002

Produsen batu bara diminta kurangi produksi

JAKARTA (Bisnis): Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia meminta perusahaan pertambangan mengurangi produksi untuk menaikkan harga batu bara di pasar internasional.

Sekjen Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia Jeffry Mulyono mengungkapkan kondisi pasar batu bara internasional sedang kelebihan pasokan sehingga harga komoditas itu anjlok. "Yang jadi masalah saat ini adalah besarnya pasokan batu bara dari Indonesia ke pasar internasional, sehingga harga anjlok," katanya kemarin.

Menurut dia, salah satu solusi untuk menaikkan harga komoditas itu di pasar internasional adalah dengan cara Indonesia mengurangi produksi.

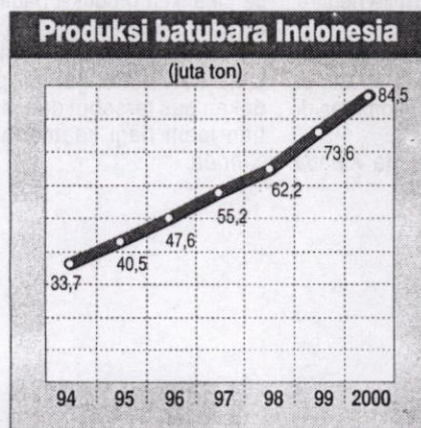
Jeffry menyangkan upaya perusahaan tambang dari Indonesia yang terlalu banyak memasok batu bara tanpa menerima harga yang pantas.

"APBI [Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia] terus mengimbau supaya produsen batu bara introspeksi apakah bijaksana memproduksi batu bara dengan volume besar sedangkan komposisi harga tidak kondusif."

Jika keadaannya terus dipertahankan seperti itu, lanjutnya, maka selain perusahaan, pemerintah juga merugi karena jumlah pajak yang dihasilkan menurun.

Berbeda dengan Jeffry, Sekjen Perhimpunan ahli Pertambangan Indonesia Juangga Mangasi mengatakan perusahaan tambang tidak dapat begitu saja mengurangi kapasitas produksi.

"Mereka terikat kontrak dengan konsumen. Perlu diketahui bahwa pengusaha batu bara sebelum memproduksi sudah mendapat konsumen terlebih dahu-



Sumber: Direktorat Batubara

lu jadi jumlah produksi harus dipenuhi," tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, kelebihan pasokan tersebut bukan semata-mata diakibatkan oleh jumlah produksi perusahaan tambang meningkat tapi juga karena makin maraknya faktor penambang liar.

Juangga mengatakan anjuran untuk mengurangi produksi yang sudah disepakati kontrak jelas tidak bisa. Namun demikian, lanjutnya, upaya mengurangi produksi dapat diterapkan pada menunda upaya ekspansi produksi.

Menurut data *Bisnis*, harga batu bara di pasar internasional internasional pada 2000 menurun menjadi US\$29.000 ton per tahun dari US\$30.000 ton per tahun. Sedangkan jumlah produksi pada 2000 meningkat sebesar 84.500 juta ton dari tahun sebelumnya 73.647 ton.

Ancaman dari Cina

Sementara itu Noke Kiroyan, Presdir PT Kaltim Prima Coal, mengemukakan bahwa usaha batu bara nasional menghadapi ancaman serius dengan mun-

culnya Cina sebagai negara produsen terkemuka di dunia. "Tingkat produksi batu bara dari Cina mencapai 1 miliar ton per tahun," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa tingginya produksi batu bara Cina diikuti dengan peningkatan batu bara yang diekspor guna memenuhi konsumsi batubara dunia.

"Kualitas produksi batu bara yang dihasilkan Cina, relatif sama dengan batubara yang dihasilkan perusahaan batu bara nasional. Jadi, hendaknya perkembangan global ini menjadi perhatian serius," katanya kepada *Bisnis* pekan ini di Balikpapan.

Jika perbatubaraan nasional tidak melakukan konsolidasi, menurut dia, bisa jadi masa-masa gemilang batu bara nasional akan segera berakhir dengan kehadiran Cina di pentas usaha batu bara global.

"Sebagai perbandingan, produksi batu bara Indonesia setahunnya hanya mencapai 80 juta ton. Jumlah produksi itu sudah sangat jauh dilampaui Cina di mana untuk pasokan ekspor [dari Cina ke pasar internasional] saja sudah 90 juta ton/tahun," ujarnya.

Dia mengingatkan usaha batu bara nasional jangan sampai mengabaikan perkembangan global itu dengan hanya sibuk soal gonjang-ganjing masalah yang tidak substansial, seperti proses divestasi 51% saham PT KPC.

"Selama ini, kita terjebak dalam hal-hal yang tidak signifikan dalam upaya peningkatan nilai kompetitif batu bara nasional di pentas perbatubaraan global," katanya.

Jeffry Mulyono mengakui untuk jangka pendek Cina dapat menjadi pesaing di pasar internasional. "Tapi jangan dilupakan bahwa industri Cina saat ini berkembang sangat cepat," tuturnya belum lama ini. (p2/09)